

Analisis Patroli Polairud Polres Dumai dalam Pencegahan kejahatan Maritim

Analysis of The Water And Air Police (Polairud) Patrols of Dumai Police Resort In Preventing Maritime Crime

Zatira Rahma Azalia¹, Riky Novarizal^{2*}

Program Studi Ilmu Kriminologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Islam Riau

ARTICLE INFO

Article history:

Received 10 April 2026

Revised 15 April 2026

Accepted 20 April 2026

Available online 22 April 2026

Keywords: Patroli, Kejahatan Maritim, Polairud, Pencegahan Kejahatan, Situational Crime Prevention

Keywords: Patrol, Maritime Crime, Polairud, crime Prevention, Situational Crime Prevention



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2024 by Author. Published by Universitas Islam Riau.

ABSTRACT

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia menghadapi tantangan serius dalam menjaga keamanan maritim, khususnya di wilayah strategis seperti perairan Dumai yang berbatasan langsung dengan Selat Malaka, sehingga meningkatkan urgensi penguatan patroli dalam mencegah kejahatan maritim seperti illegal fishing, penyelundupan, dan kejahatan pelayaran. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas patroli Polairud Polres Dumai dalam pencegahan kejahatan maritim dengan menggunakan perspektif Situational Crime Prevention (SCP). Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan jenis studi kasus, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap informan yang dipilih secara purposive, serta dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa patroli Polairud telah menerapkan strategi SCP secara efektif, meliputi target hardening, access control, increasing the risk, reducing rewards, dan removing excuses, yang terbukti mampu menekan peluang kejahatan maritim meskipun masih dihadapkan pada kendala seperti luasnya wilayah pengawasan dan dinamika modus

kejahatan. Dengan demikian, patroli Polairud Polres Dumai memiliki kontribusi signifikan dalam pencegahan kejahatan maritim, namun perlu ditingkatkan melalui pemanfaatan teknologi, penguatan koordinasi antarinstansi, serta pengembangan strategi yang lebih adaptif, sehingga penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji integrasi teknologi pengawasan dan kolaborasi lintas sektor dalam memperkuat keamanan maritim.

ABSTRACT

Indonesia, as the world's largest archipelagic state, faces significant maritime security challenges, particularly in strategic areas such as Dumai waters bordering the Malacca Strait, highlighting the urgency of strengthening patrol strategies to prevent maritime crimes such as illegal fishing, smuggling, and shipping-related offenses. This study aims to analyze the effectiveness of patrols conducted by the Water and Air Police (Polairud) of Dumai Police Resort in preventing maritime crime using the perspective of Situational Crime Prevention (SCP). This research employs a qualitative method with a descriptive approach and a case study design, with data collected through interviews, observations, and documentation involving purposively selected informants, and analyzed through data reduction, data display, and conclusion drawing. The findings indicate that Polairud patrols have effectively implemented SCP strategies, including target hardening, access control, increasing the risk, reducing rewards, and removing excuses, which have contributed to reducing opportunities for maritime crime, although challenges remain such as the vast surveillance area and evolving criminal patterns. In conclusion, Polairud patrols in Dumai play a significant role in maritime crime prevention, but require further enhancement through technological support, stronger inter-agency coordination, and more adaptive strategies, and future research is recommended to explore the integration of surveillance technology and cross-sector collaboration in strengthening maritime security.

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan wilayah laut mencapai 6,4 juta km² menghadapi tantangan keamanan maritim yang kompleks, terutama di perairan strategis seperti Dumai, Riau. Perairan Dumai, yang berbatasan dengan Selat Malaka, menjadi

*Corresponding author

E-mail: zatirarahmaazalia@student.uir.ac.id, riky.novarizal@soc.uir.ac.id

jalur vital perdagangan internasional namun rawan kejahatan seperti illegal fishing, penyelundupan, dan pencurian kapal. Patroli oleh Polairud Polres Dumai memainkan peran krusial sebagai benteng pertama dalam menjaga kedaulatan wilayah tersebut.

Tren kejahatan maritim terkini menunjukkan peningkatan signifikan, di mana KKP berhasil menangkap 326 kapal ilegal dari Oktober 2024 hingga Oktober 2025, menyelamatkan potensi kerugian negara hingga Rp3,59 triliun. Posisi geopolitik Indonesia di persimpangan dua samudra dan benua memposisikan negara ini sebagai target utama sindikat transnasional, dengan kerugian ekonomi mencapai triliunan rupiah per tahun. Dampaknya meliputi penurunan pendapatan nelayan lokal, ancaman kedaulatan wilayah, dan destabilisasi keamanan nasional. Di konteks lokal Dumai, kejahatan maritim tidak hanya mengancam ekonomi migas dan perikanan, tetapi juga stabilitas sosial masyarakat pesisir.

Relevansi analisis patroli Polairud semakin kuat ketika dilihat dari perspektif Situational Crime Prevention (SCP) Ronald V. Clarke yang menekankan pengurangan peluang kejahatan melalui manipulasi faktor situasional. Pendekatan SCP memberikan landasan metodologis untuk mengukur efektivitas intervensi kepolisian maritim.

No.	Jenis Kasus	2023	2024	2025	Jumlah
1.	<i>Illegal Fishing</i>	53	50	21	124
2.	Kejahatan Pelayaran	15	20	11	46
3.	Kejahatan Terkait Perairan Indonesia	1	3	4	8
Jumlah Kasus					178

Sumber: Pusat Analisis Kriminal Nasional Polri 2025

Berdasarkan data di atas, meskipun illegal fishing berhasil ditekan secara signifikan, total kasus kejahatan maritim justru mengalami puncak tertinggi sebanyak 73 kasus pada tahun 2024 sebelum turun menjadi 36 kasus pada tahun 2025, menunjukkan pola kerawanan yang berkelanjutan di perairan Dumai. Tren peningkatan bertahap kejahatan terkait perairan Indonesia dari 1 menjadi 4 kasus selama periode 2023-2025 menandakan munculnya ancaman baru yang bersifat transnasional dan memerlukan pendekatan pencegahan yang lebih adaptif.

Selanjutnya disparitas yang mencolok antar jenis kasus kejahatan mengungkap adanya celah situasional yang sistematis dalam strategi pencegahan saat ini: sementara illegal fishing berhasil ditekan, kejahatan pelayaran justru mengalami lonjakan 33,33% dari 15 menjadi 20 kasus pada tahun 2024 sebelum akhirnya menurun, yang mengindikasikan perlunya optimalisasi strategi patroli yang lebih spesifik terhadap hotspot dan modus operandi masing-masing jenis kejahatan.

Walaupun berbagai upaya patroli dan pencegahan kejahatan maritim telah dilakukan oleh Polairud Polres Dumai, praktik illegal fishing, kejahatan pelayaran, dan kejahatan terkait perairan Indonesia masih terus berlangsung dengan total 178 kasus selama periode 2023-2025. Hal ini menunjukkan adanya tantangan dalam implementasi strategi patroli, koordinasi antarinstansi seperti Bea Cukai dan KSOP, serta pengawasan wilayah perairan Dumai yang luas dan strategis di Selat Malaka. Sebagian besar penelitian sebelumnya lebih banyak membahas keamanan maritim dalam perspektif nasional.

Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas patroli oleh Polairud Polres Dumai dalam pencegahan kejahatan maritim dengan mengintegrasikan pada teori Situational Crime Prevention (SCP). Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian kriminologi maritim dan pencegahan kejahatan situasional, khususnya

dalam konteks operasi kepolisian lokal di perairan strategis Indonesia. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Polri dan aparat penegak hukum dalam merumuskan strategi patroli yang lebih efektif guna mencegah dan menekan kejahatan maritim, khususnya di perairan Dumai dan Polres maritim lainnya di Indonesia.

METODE PENELITIAN

pendekatan deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena bertujuan untuk memahami fenomena secara mendalam dalam kondisi alami tanpa manipulasi terhadap objek penelitian. Penelitian kualitatif menekankan pada makna, interpretasi, dan pemahaman terhadap realitas sosial yang dibangun melalui interaksi antarindividu. Dengan demikian, metode ini relevan untuk mengkaji bagaimana patroli oleh Polairud dilakukan dalam mencegah kejahatan maritim, termasuk memahami faktor pendukung dan hambatan yang terjadi di lapangan. Pendekatan deskriptif digunakan agar peneliti dapat menggambarkan fenomena secara sistematis, faktual, dan akurat sehingga mudah dipahami oleh pembaca.

Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus, yang berfokus pada satu objek tertentu, yaitu kegiatan patroli Polairud Polres Dumai. Studi kasus dipilih karena memungkinkan peneliti menggali informasi secara mendalam dan kontekstual terkait praktik patroli di wilayah tersebut. Lokasi penelitian ditetapkan di Kota Dumai, khususnya di Kantor Polairud Polres Dumai, karena wilayah ini memiliki karakteristik strategis sebagai daerah pesisir dengan potensi kerawanan kejahatan maritim. Pemilihan lokasi ini mendukung tujuan penelitian agar hasil yang diperoleh lebih relevan dengan kondisi nyata di lapangan.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari informan melalui interaksi lapangan seperti wawancara dan observasi, sehingga bersifat spesifik dan sesuai dengan kebutuhan penelitian. Sementara itu, data sekunder berasal dari buku, jurnal, dokumen resmi, serta arsip yang relevan, yang berfungsi sebagai pendukung dan penguat data primer. Kombinasi kedua jenis data ini penting untuk meningkatkan validitas temuan penelitian.

Penelitian ini berdasarkan pertimbangan bahwa mereka memiliki pengetahuan dan keterlibatan langsung dalam kegiatan patroli. Informan terdiri dari key informant seperti Kasat Polairud, serta informan lain seperti Kanit Patroli, Kanit Gakkum, dan masyarakat pesisir. Teknik ini digunakan agar data yang diperoleh benar-benar relevan dan mendalam sesuai dengan tujuan penelitian.

Prosedur analisis data dilakukan secara kualitatif melalui beberapa tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilih dan menyederhanakan data yang relevan. Penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi agar mudah dipahami. Selanjutnya, penarikan kesimpulan dilakukan dengan menginterpretasikan data untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Proses ini dilakukan secara sistematis sehingga menghasilkan temuan yang valid, reliabel, dan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai efektivitas patroli dalam mencegah kejahatan maritim.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa wilayah perairan Kota Dumai memiliki tingkat kerawanan yang cukup tinggi terhadap berbagai bentuk kejahatan maritim, seperti penyelundupan barang ilegal, penggunaan alat tangkap terlarang, serta aktivitas keluar-masuk ilegal melalui pelabuhan tradisional. Kondisi geografis Dumai yang berbatasan langsung dengan negara tetangga serta memiliki banyak jalur perairan kecil menjadi faktor utama yang membuka peluang terjadinya kejahatan. Dalam perspektif *Situational Crime Prevention* (SCP), kondisi ini

menunjukkan adanya “opportunity structure” yang dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan, di mana lemahnya pengawasan pada titik-titik tertentu dapat meningkatkan potensi terjadinya tindak kriminal.

Menanggapi kondisi tersebut, Polairud Polres Dumai melaksanakan patroli secara rutin dengan pendekatan berbasis pemetaan wilayah rawan. Berdasarkan hasil wawancara, patroli difokuskan pada titik-titik strategis seperti pelabuhan tradisional, daerah pesisir, serta jalur-jalur tikus yang sering digunakan untuk aktivitas ilegal. Strategi ini sejalan dengan konsep target hardening dalam SCP, yaitu memperkuat pengamanan pada lokasi yang berpotensi menjadi sasaran kejahatan. Dengan meningkatkan kehadiran aparat di wilayah tersebut, pelaku kejahatan akan menghadapi kesulitan lebih besar dalam menjalankan aksinya.

Selain itu, Polairud juga menerapkan strategi access control dengan melakukan pemeriksaan terhadap kapal, barang bawaan, serta aktivitas masyarakat di sekitar pelabuhan. Razia terhadap penggunaan alat tangkap ilegal dan pemeriksaan dokumen kapal merupakan bentuk konkret dari pembatasan akses terhadap peluang kejahatan. Dalam hal ini, patroli tidak hanya berfungsi sebagai pengawasan, tetapi juga sebagai upaya preventif untuk menutup celah-celah yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan. Hal ini menunjukkan bahwa kontrol terhadap akses menjadi faktor penting dalam mengurangi kemungkinan terjadinya pelanggaran hukum di wilayah perairan.

Dari sisi peningkatan risiko (*increasing the risk*), hasil penelitian menunjukkan bahwa patroli dilakukan tidak hanya secara rutin, tetapi juga pada waktu-waktu tertentu yang dianggap rawan, seperti malam hari dan saat kondisi pasang surut air laut. Intensitas patroli yang tinggi serta keterlibatan berbagai instansi seperti TNI AL, Bea Cukai, dan Bakamla turut meningkatkan efektivitas pengawasan. Kehadiran aparat secara langsung di lapangan memberikan efek psikologis bagi pelaku, sehingga meningkatkan risiko tertangkap dan pada akhirnya menurunkan niat untuk melakukan kejahatan.

Selanjutnya, dalam aspek *reducing rewards*, Polairud Polres Dumai melakukan tindakan tegas berupa penyitaan terhadap barang hasil kejahatan, seperti hasil tangkapan ilegal atau barang selundupan. Berdasarkan hasil wawancara, tindakan ini dinilai efektif karena mengurangi keuntungan yang diperoleh pelaku, sehingga kejahatan menjadi tidak lagi menarik secara ekonomi. Selain itu, penutupan jalur-jalur ilegal yang sering digunakan juga turut menghilangkan peluang bagi pelaku untuk mendapatkan keuntungan dari aktivitas tersebut.

Dalam aspek *removing excuses*, patroli yang dilakukan juga disertai dengan pendekatan persuasif melalui sosialisasi kepada masyarakat pesisir. Edukasi mengenai aturan hukum, larangan penggunaan alat tangkap ilegal, serta bahaya kejahatan maritim menjadi bagian dari strategi pencegahan. Dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat, diharapkan tidak ada lagi alasan atau pembenaran untuk melakukan pelanggaran hukum. Pendekatan ini menunjukkan bahwa pencegahan kejahatan tidak hanya dilakukan melalui tindakan represif, tetapi juga melalui peningkatan kesadaran hukum masyarakat.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa patroli yang dilakukan oleh Polairud Polres Dumai telah mengimplementasikan prinsip-prinsip Situational Crime Prevention secara cukup efektif. Upaya seperti penguatan pengawasan, pembatasan akses, peningkatan risiko, pengurangan keuntungan, serta penghilangan alasan kejahatan terbukti mampu menekan potensi kejahatan maritim di wilayah tersebut. Namun demikian, dinamika kejahatan yang terus berkembang, seperti perubahan modus operandi dan pergeseran jalur ilegal, menjadi tantangan tersendiri yang memerlukan adaptasi strategi patroli yang lebih fleksibel dan berbasis teknologi. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan koordinasi antarinstansi serta pemanfaatan teknologi pengawasan untuk mendukung efektivitas patroli di masa mendatang.

SIMPULAN

1. Patroli Polairud Polres Dumai berperan penting dalam mencegah kejahatan maritim, terutama di wilayah rawan seperti pelabuhan tradisional dan jalur perairan ilegal.
2. Pelaksanaan patroli telah dilakukan secara terarah melalui pemetaan wilayah rawan (crime mapping), sehingga lebih efektif dalam pengawasan.
3. Berdasarkan teori *Situational Crime Prevention* (SCP), strategi patroli telah mencakup upaya memperkuat pengamanan (*target hardening*), pembatasan akses (*access control*), peningkatan risiko (*increasing the risk*), pengurangan keuntungan (reducing rewards), serta penghilangan alasan melakukan kejahatan (*removing excuses*).
4. Upaya patroli terbukti mampu menekan peluang kejahatan maritim, meskipun masih terdapat kendala seperti luasnya wilayah pengawasan dan perubahan modus kejahatan.

SARAN

1. Polairud Polres Dumai perlu meningkatkan intensitas patroli, khususnya pada waktu dan lokasi yang dianggap rawan kejahatan.
2. Perlu adanya pemanfaatan teknologi pengawasan, seperti radar atau CCTV laut, untuk memperkuat sistem monitoring wilayah perairan.
3. Meningkatkan kerja sama dan koordinasi dengan instansi terkait seperti TNI AL, Bakamla, dan Bea Cukai agar pengawasan lebih optimal.
4. Melakukan sosialisasi secara berkelanjutan kepada masyarakat pesisir guna meningkatkan kesadaran hukum dan partisipasi dalam pencegahan kejahatan.
5. Mengembangkan strategi patroli yang lebih adaptif terhadap perubahan pola dan modus kejahatan maritim di masa mendatang.

REFERENSI

- Badan Keamanan Laut Republik Indonesia. (2023). Peran Bakamla dalam penanganan kejahatan maritim di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 6(4). <https://www.jiip.stkipyapisdompnu.ac.id/jiip/index.php/JIIP/article/view/6210>
- Badan Riset dan Inovasi Nasional. (2021). Keamanan maritim di Laut Sulawesi dan Laut Sulu: Tantangan dan kerja sama regional. *Jurnal Penelitian Politik*, 18(2). <https://ejournal.brin.go.id/jpp/article/view/10790>
- Clarke, R. V. (1997). *Situational crime prevention: Successful case studies* (2nd ed.). Harrow and Heston.
- Hidayat, R., & Santoso, A. (2025). Sinergitas TNI Angkatan Laut dan Polri dalam membangun ketahanan maritim di perairan Dumai. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 5(1), 45-62. <https://www.jiip.stkipyapisdompnu.ac.id>
- Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia. (2022). Strategi keamanan maritim Indonesia dalam menghadapi ancaman kejahatan transnasional. *Jurnal Kajian Lemhannas RI*, 10(2), 45-60. <https://jurnal.lemhannas.go.id/index.php/jkl/article/view/476>
- Novarizal, R., & Kumara, M. A. (2023). Strategi dan peran Bea Cukai dalam menangani penyelundupan barang ilegal di Kabupaten Bengkalis. *JIABIS: Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis dan Sosial*, 1(2).
- Novarizal, R., & Yakin, S. M. A. (2025). Upaya penanganan kejahatan penyelundupan di wilayah perairan Tanjung Jabung Barat oleh Polairud Polres Tanjung Jabung Barat. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 5(3). <https://doi.org/10.31004/innovative.v5i3.19637>
- Pragas. (2023). Strategi pencegahan kejahatan situasional. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 12(2), 112-130. <https://pragas.co.id/strategi-pencegahan-kejahatan-situasional-2/>

- Prayuda, R., & Harto, S. (2020). ASEAN dan kejahatan transnasional narkoba (dinamika, tantangan dan hambatan).
- Riviera Publishing. (2023). Peredaran narkoba melalui jalur laut sebagai kejahatan transnasional di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Indonesia*, 8(3).
<https://jii.rivierapublishing.id/index.php/jii/article/view/3497>
- Sari, N. P. (2025). Strategi Bakamla dalam menghadapi ancaman kejahatan di Selat Malaka. *Jurnal Kebijakan Publik*, 8(1), 78-95.
<https://journal.uir.ac.id/index.php/JKP/article/view/21794>
- Zulherawan, M., Latif, S. A., & Afgani, Y. (2018). Penyelundupan manusia di perbatasan maritim Malaysia-Indonesia: Studi kasus di Pulau Bengkalis. *Asian People Journal*, 1(1), 138-147.